

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI LAMPUNG TENGAH (Studi Pada Polres Lampung Tengah)

Oleh

Nurlailatul Saleha

Penambangan pasir ilegal di Lampung Tengah merupakan aktivitas yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan merugikan negara. Kegiatan ini merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap pelaku usaha penambangan tanpa izin yang masih marak terjadi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan pasir ilegal di Lampung Tengah, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan pasir ilegal di Lampung Tengah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung oleh pendekatan empiris. Narasumber terdiri dari aparat penyidik Polres Lampung Tengah dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran utuh mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan pasir ilegal di Lampung Tengah.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan pasir ilegal di Lampung Tengah secara konseptual terdiri dari tahapan formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Tahap formulasi diwujudkan melalui pengaturan tindak pidana penambangan tanpa izin dalam Undang-Undang Minerba. Tahap aplikasi dilaksanakan oleh penyidik Polres Lampung Tengah melalui kegiatan penyelidikan, penyidikan, serta penyusunan berkas perkara. Tahap eksekusi dipahami sebagai tahap pelaksanaan sanksi pidana termasuk pelaku tindak pidana, termasuk juga pelaksanaan pidana oleh lembaga pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nurlailatul Saleha

Akan tetapi dalam pelaksanaannya, penegakan hukum tersebut belum berjalan secara optimal, khususnya pada tahap aplikasi, yang ditandai dengan masih maraknya praktik penambangan pasir ilegal di wilayah Lampung Tengah. Faktor paling dominan yang mempengaruhi dalam penegakan hukum tersebut berasal dari faktor masyarakat dan budaya hukum. Faktor Masyarakat rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta kondisi sosial dan ekonomi yang mendorong masyarakat untuk tetap melakukan penambangan pasir tanpa izin menyebabkan pelanggaran hukum terus berulang. Selain itu, budaya hukum yang belum terbentuk dengan baik mengakibatkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan masih rendah.

Saran dalam penelitian ini adalah disarankan agar Polres Lampung Tengah dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum secara tegas dan konsisten, khususnya pada tahap aplikasi, serta memperkuat koordinasi dengan instansi terkait. Selain itu, pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum perlu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi yang berkelanjutan dan melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar memiliki alternatif mata pencaharian yang legal, sehingga dapat mendukung terciptanya budaya hukum yang lebih baik dan meningkatkan kepatuhan terhadap hukum.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penambangan Pasir Ilegal

ABSTRACT

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI LAMPUNG TENGAH (Studi Pada Polres Lampung Tengah)

By

Nurlailatul Saleha

This study aims to analyze and evaluate the law enforcement process against illegal sand mining crimes in Central Lampung Regency, as well as to identify the factors that hinder its implementation. Illegal sand mining has become a serious issue due to its environmental destruction, state financial losses, and the decline of public trust in law enforcement authorities. Therefore, this research focuses on assessing the effectiveness of the Central Lampung Police in handling illegal sand mining cases within their jurisdiction.

The research employs a normative juridical approach supported by an empirical approach. Data were collected through literature studies, including statutory regulations, academic sources, and field interviews with law enforcement officers and relevant parties. This approach aims to obtain a factual picture of how law enforcement is implemented and the practical challenges faced in the field.

The results of the research and discussion indicate that law enforcement against illegal sand mining crimes in Central Lampung Regency has been carried out through the stages of formulation, application, and execution. The formulation stage is manifested through the regulation of illegal mining offenses under the Mineral and Coal Mining Law (Minerba). The application stage is carried out by investigators of the Central Lampung Police through inquiry, investigation, and the preparation of case files. The execution stage is implemented through prosecution and court proceedings to impose criminal sanctions on the offenders.

Nurlailatul Saleha

However, in practice, law enforcement has not been optimal, particularly at the application stage, as evidenced by the continued prevalence of illegal sand mining in Central Lampung. The most dominant inhibiting factors in law enforcement stem from societal factors and legal culture. Low public legal awareness, coupled with social and economic conditions that encourage people to continue illegal sand mining, lead to repeated violations. Furthermore, an underdeveloped legal culture results in low levels of public compliance with mining laws and regulations.

This research recommends that the Central Lampung Police improve the effectiveness of firm and consistent law enforcement, particularly at the application stage, and strengthen coordination with relevant agencies. Furthermore, the local government, along with law enforcement officials, needs to raise public legal awareness through ongoing outreach and economic empowerment initiatives, enabling them to have alternative legal livelihoods. This will support the creation of a better legal culture and increase compliance with the law.

Keywords: *Law enforcement, criminal act, illegal sand mining.*